

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian profitabilitas semata, tetapi juga berusaha mencapainya dengan cara yang berkelanjutan yakni dengan menyesuaikan praktik bisnis agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Perusahaan yang mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan berisiko kehilangan keberlangsungan bisnisnya di masa depan. Fenomena ini masih sering dijumpai di Indonesia yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan dalam dunia usaha masih tergolong rendah. Salah satu langkah penting menuju keberlanjutan adalah melalui pengungkapan laporan keberlanjutan (Qisthi & Fitri, 2020).

Pelaporan keberlanjutan telah menjadi fokus utama dalam dunia bisnis global sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk menginformasikan kepada publik mengenai kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini mencerminkan dampak aktivitas operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta kini menjadi bagian penting dalam laporan tahunan, baik di negara maju maupun berkembang. Dalam konteks praktik akuntansi, pelaporan ini dikenal dengan istilah *Sustainability Reporting*. Seiring berkembangnya konsep tanggung jawab sosial, definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku

kepentingan, bukan hanya pemegang saham semata (Spence et al., 2001) (Vos, 2003) (Sweeney & Coughlan, 2008).

Selain itu, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang secara aktif mengungkapkan kinerja keberlanjutannya selama periode 2018 hingga 2022. Data ini diperoleh dari *Corporate Register* sebuah direktori *online* berskala global yang mencatat laporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan pelaporan keberlanjutan yang dipublikasikan.



**Gambar 1.1 Jumlah Partisipan Laporan Keberlanjutan di Indonesia**  
(Sumber: Corporate Register, 2023)

Berdasarkan Laporan *Asia Pacific Sustainability Counts II* menjelaskan beberapa poin, yakni : (i) peningkatan secara keseluruhan dalam pengungkapan risiko dan atau peluang terkait iklim yang teridentifikasi dalam *sustainability report* perusahaan dari 77 persen pada tahun 2021 menjadi 88 persen pada tahun 2022, (ii) di sebagian besar yurisdiksi Asia Pasifik, 92 persen perusahaan memiliki target *Environment, Social and Governance* (ESG), (iii) standar GRI dan SDGs menjadi standar dan kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk

*sustainability report* di sebagian besar yurisdiksi. Meskipun peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang positif, namun dibandingkan negara lain khususnya ASEAN, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data pelaporan iklim ASEAN tahun 2022 yang dikutip dalam UU (2022), tingkat pelaporan keberlanjutan masing-masing negara adalah sebagai berikut: Indonesia sebesar 44%, Malaysia sebesar 48%, Filipina sebesar 42%, Singapura sebesar 48%, dan Thailand sebesar 57%.

Kajian studi ini menggunakan perusahaan perbankan dalam penelitian karena tingkat pengungkapan perusahaan perbankan lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Berdasarkan ringkasan laporan data *Corporate Sustainability Index* (KCSI) tahun 2023, hasil pengungkapan data keberlanjutan laporan perusahaan pada sektor perbankan sebesar 31,03%, pada sektor bahan kimia sebesar 41,88%, dan pada sektor transportasi dan logistik sebesar 43,26%, sebesar 46,57% pada sektor industri dan pangan, 49,13% pada sektor energi, 50,22% pada sektor pertambangan, dan 56,86% pada sektor perkebunan. KCSI mengukur dan memetakan perusahaan berdasarkan kinerja industri dan keberlanjutan perusahaannya berdasarkan dimensi ESG (*Environmental, Social, dan Governance*).

Di Indonesia, kewajiban penerbitan laporan keberlanjutan bagi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan setiap tahun

sejak 2020. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan antara bank-bank besar dan bank-bank skala menengah maupun kecil, baik dari segi kelengkapan isi, frekuensi penerbitan, penggunaan standar global, maupun kualitas pengungkapan. Berikut disajikan perbandingan laporan keberlanjutan dilihat dari aspek cakupan & standar, format, kualitas pengungkapan, dan tingkat kepatuhan.

**Tabel 1.1 Perbandingan Pelaporan Keberlanjutan Perbankan di Indonesia**

No	Aspek Perbandingan	Bank Buku IV	Bank Buku III	Bank Buku I & II
1	Cakupan & Standar	Sudah menggunakan GRI Standards, beberapa juga merujuk pada SASB dan TCFD	Sudah mulai mengadopsi GRI, namun belum semua laporan konsisten dalam kedalaman data.	Sebagian besar belum menyusun laporan keberlanjutan yang lengkap; pengungkapan hanya terbatas pada aktivitas CSR dalam laporan tahunan.
2	Format	Terpisah dari laporan tahunan (standalone report)	Sebagian besar masih tergabung dalam laporan tahunan.	Tidak ada laporan terpisah.
3	Kualitas Pengungkapan	Tinggi - mencakup data kuantitatif, target ESG, peta risiko iklim, dan strategi jangka panjang.	Sedang - lebih deskriptif, namun masih terbatas dalam pengungkapan dampak kuantitatif.	Rendah - umumnya hanya untuk memenuhi formalitas regulasi, belum mengarah ke pelaporan ESG
4	Tingkat Kepatuhan	Sangat tinggi terhadap POJK 51/2017 dan SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Format Laporan Keberlanjutan.	Umumnya patuh, tetapi variasi kualitas cukup besar.	Rendah sampai sedang

Dari perspektif eksternal, kegiatan usaha sektor perbankan tampaknya memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Faktanya, sektor perbankan juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai penyandang dana kegiatan industrialisasi dan pembangunan melalui proses pemberian pinjaman kepada perusahaan. Dalam artikel (Ronaldo & Handayani, 2023) perusahaan perbankan terlibat dalam pembiayaan proyek kepada perusahaan batubara, di antaranya PT Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp 36 triliun. Termasuk beberapa bank Indonesia seperti PT BNI Tbk sejumlah Rp27 triliun, PT BRI Tbk dengan jumlah Rp 26 triliun, dan PT BCA Tbk sejumlah Rp12 triliun. Salah satu proyek yang didanai perbankan adalah PLTU Jawa 9 dan 10 yang pengoperasiannya diduga menyebabkan 4.700 kematian. Oleh karena itu, diharapkan agar perusahaan perbankan fokus pada proyek yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk pengungkapan laporan keberlanjutan.

Diperkuat dengan kajian internasional pada sektor keuangan Denmark yang telah menginvestasikan hampir KR 2.000 miliar di perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada akhir tahun 2024. Angka-angka baru dari Danmarks Nationalbank menunjukkan bahwa sektor tersebut membiayai emisi sejumlah total 11,8 juta ton gas rumah kaca pada tahun 2024. Angka tersebut mencerminkan pembiayaan sektor keuangan terhadap emisi gas rumah kaca dari investasi di saham-saham yang terdaftar dan obligasi korporasi tetapi tidak termasuk emisi yang dibiayai melalui pinjaman dan kredit dari lembaga-lembaga kredit. Emisi yang dibiayai terkonsentrasi di beberapa saham dan obligasi yang terdaftar. Dengan demikian,

sepuluh perusahaan di antara investasi sektor keuangan yang paling banyak mengeluarkan emisi menyumbang sekitar 1 persen dari investasi, sementara mereka mewakili lebih dari seperlima emisi yang dibiayai sektor tersebut. Riset oleh Jindal et al., (2024) menjelaskan bahwa (i) pada tingkat sistem, jejak karbon bank-bank di India menunjukkan tren peningkatan selama periode studi dengan agregat pinjaman bank meningkat sebesar 9,4 persen dari 332,5 tCO<sub>2</sub>e/US\$ juta pada tahun 2010 menjadi 363,7 tCO<sub>2</sub>e/US\$ juta pada tahun 2016, (ii) pada tingkat kelompok, sementara emisi yang dibiayai bank-bank sektor publik telah mencapai titik jenuh.

Riset sebelumnya yang dilakukan Chaerani et al., (2024) menyatakan bahwa secara umum seluruh perusahaan yang dijadikan sampel penelitian telah menyajikan pengungkapan terkait GRI 200 kinerja keuangan. Namun demikian, tidak semua item pengungkapan yang ada dalam standar GRI 200 diungkapkan oleh perusahaan. Adapun pengungkapan GRI 200 yang telah lengkap disajikan oleh perusahaan perbankan hanya pengungkapan GRI 203 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang dialami oleh perusahaan. Di sisi lain, pengungkapan GRI 201, 202, 204, 205, 206 dan 207 belum disajikan pada seluruh perusahaan perbankan atau telah disajikan namun item pengungkapannya belum tersaji secara lengkap dan detail. Pengungkapan yang belum lengkap terhadap GRI 201 (kinerja ekonomi langsung), GRI 202 (kehadiran lokal), GRI 204 (praktik pengadaan), GRI 205 (anti-korupsi), GRI 206 (anti-kompetisi), dan GRI 207 (pajak) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keberlanjutan dan pelaporan ESG di sektor perbankan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan.

Keterbatasan data, belum adanya standardisasi pengukuran, serta kurangnya kapabilitas teknis internal bisa menjadi penyebab utama.

Penelitian pada 38 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa tekanan yang berasal dari karyawan memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, baik dari segi frekuensi penerbitan maupun penggunaan jasa *assurance* pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas laporan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemangku kepentingan internal, khususnya karyawan, memiliki posisi strategis dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan. Sebaliknya, tekanan yang datang dari publik eksternal maupun regulator pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keterbukaan informasi keberlanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa dorongan untuk bersikap transparan dalam pelaporan keberlanjutan belum sepenuhnya berasal dari kewajiban hukum atau ekspektasi masyarakat luas, melainkan lebih dipicu oleh faktor internal perusahaan (Renata et al., 2024).

Berbagai faktor dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan, dan salah satu yang paling signifikan adalah tekanan dari para pemangku kepentingan. Tekanan ini mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam menjaga reputasi positif di hadapan investor, pelanggan, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pemangku kepentingan mencakup individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap operasional perusahaan dan hasil yang

dihasilkannya. Tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan, perusahaan akan kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya. Perlu dicatat bahwa setiap sektor industri memiliki jenis pemangku kepentingan utama yang berbeda, tergantung pada karakteristik bisnis dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitar (Feijoo et al., 2014). Misalnya, pelanggan menjadi pemangku kepentingan utama di sektor telekomunikasi dan kosmetik, namun juga relevan di sektor minyak dan otomotif (Sweeney & Coughlan, 2008). Tekanan dari pemangku kepentingan mendorong perusahaan tidak hanya untuk menerapkan, tetapi juga mengkomunikasikan tanggung jawab sosial melalui pelaporan yang berkualitas, seperti laporan pembangunan berkelanjutan yang bersifat sukarela dan komprehensif.

Tekanan dari pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam mendorong pengungkapan pelaporan keberlanjutan di sektor perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memiliki pengaruh sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan lingkungan, bank menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, investor, pemegang saham, dan nasabah. Kelompok-kelompok ini menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola. Globalisasi telah membangkitkan kesadaran yang semakin besar akan tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan (Yuniarta et al., 2020). Tekanan tersebut mendorong bank untuk tidak hanya menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga secara aktif mengkomunikasikan komitmen dan pencapaiannya melalui laporan

keberlanjutan. Laporan ini umumnya disusun dengan mengacu pada standar internasional seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* atau kerangka *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*, yang memberikan pedoman dalam mengukur, mengelola, dan mengungkapkan risiko serta peluang terkait keberlanjutan.

Industri yang berorientasi pada investor ditandai dengan kepemilikan saham yang tersebar luas dan dominasi pemegang saham institusional, di mana para investor memiliki peran penting dalam menuntut transparansi informasi perusahaan. Dalam konteks ini, investor terutama pada perusahaan publik memiliki hak atas akses informasi keuangan maupun non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan yang mencerminkan kinerja sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori pemangku kepentingan, yang menekankan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan berhak mendapatkan informasi yang relevan. Bagi investor, informasi keberlanjutan menjadi sangat krusial tidak hanya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi yang bijak, tetapi juga untuk menilai prospek jangka panjang dan keberlanjutan bisnis perusahaan di tengah tuntutan global terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab (Putri & Wahyuningrum, 2021).

Laporan keberlanjutan adalah alat utama untuk menyediakan informasi ini, dan semakin jelas bahwa pemegang saham lebih mementingkan kualitas dan kelengkapan laporan ini. Pemegang saham dengan tingkat kepemilikan yang signifikan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk menghasilkan laporan keberlanjutan berkualitas tinggi dengan berpartisipasi dalam skema pengawasan,

seperti pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui bentuk keterlibatan lainnya. Menurut penelitian, laporan keberlanjutan perusahaan memiliki kualitas yang lebih tinggi ketika ada permintaan yang lebih besar dari pemegang saham (Feijoo et al., 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suharyani et al., 2019) menemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan telah sesuai dengan teori *stakeholder*. Tekanan dari stakeholder yang tinggi membuat perusahaan berusaha melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya dengan lebih transparan demi keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Kemudian Widyastuti (2022) menjelaskan bahwa tekanan pemegang saham memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Sriningsih & Wahyuningrum, 2022) menemukan tekanan dari pemangku kepentingan lain tidak ditemukan memiliki dampak signifikan pada kualitas laporan keberlanjutan.

Tata kelola perusahaan merujuk pada sistem, proses, dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak berkepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup struktur yang digunakan oleh organ perusahaan dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong keberhasilan usaha serta memastikan akuntabilitas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk melalui penyusunan laporan keberlanjutan (Suharyani et al., 2019). Semakin baik penerapan GCG, maka semakin besar kemungkinannya bagi

perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi, yakni laporan yang lengkap, akurat, transparan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, GCG adalah fondasi penting bagi kredibilitas dan efektivitas pelaporan keberlanjutan.

Suharyani et al. (2019) dalam risetnya menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Almagtome et al. (2020) dalam risetnya menjelaskan bahwa peringkat tata kelola perusahaan berkorelasi positif dengan skor pelaporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan di Turki. Kemudian hasil riset oleh Latifah et al. (2019) menemukan bahwa *good governance* yang diproksikan dengan dewan direksi, komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan BUMN. Riset oleh Sriningsih & Wahyuningrum (2022) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara audit oleh KAP Big 4 dan efektivitas dewan komisaris terhadap kualitas *sustainability report*. Kholmi & Nizzam (2021) menemukan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan komite audit, dewan komisaris independent dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Alotaibi (2020) menjelaskan bahwa elemen tata kelola perusahaan kecuali independensi dewan bukanlah faktor penting, yang mungkin disebabkan oleh sifat sukarela dari pengungkapan informasi keberlanjutan.

Struktur modal merupakan elemen krusial dalam menjaga pertumbuhan, stabilitas, dan ketahanan jangka panjang perusahaan. Struktur ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai aktivitas operasional dan investasinya melalui

kombinasi antara utang dan ekuitas. Sumarni et al. (2023) menekankan bahwa ketidakseimbangan struktur modal, seperti proporsi utang jangka panjang yang melebihi laba ditahan, berpotensi menimbulkan kerugian besar dan mengganggu kinerja keuangan secara keseluruhan. Seluruh bisnis, tanpa terkecuali, perlu secara cermat mempertimbangkan strategi struktur modal karena kualitas struktur tersebut akan berdampak langsung terhadap posisi keuangan perusahaan, termasuk stabilitas arus kas, beban bunga, dan fleksibilitas investasi. Struktur modal yang terlalu agresif (berbasis utang tinggi) dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko, termasuk risiko non-keuangan seperti tekanan dari pemangku kepentingan terkait isu keberlanjutan. Para *stakeholder* perusahaan, akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Hal ini berarti, manajer perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) (Aini & Subardjo, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wurdiani et al. (2022) menemukan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability reporting* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil yang berbeda diperoleh (Aini & Subardjo, 2018) yang menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Imron & Hamidah (2022) juga menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan reksa dana. Pemilik institusional umumnya memiliki kapasitas, keahlian, dan kepentingan jangka panjang dalam memastikan perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai pihak yang memiliki kekuatan pengawasan signifikan, kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme tata kelola eksternal yang memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Kepemilikan institusional berperan penting sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat pengaruh tekanan *stakeholder*, penerapan *good corporate governance*, dan struktur modal terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Kehadiran pemilik institusional mendorong perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan secara lebih serius dan berkualitas tinggi, karena mereka membawa kepentingan jangka panjang, tekanan pengawasan yang kuat, serta harapan terhadap praktik bisnis berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, pelaporan keberlanjutan menjadi alat penting untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendanaan, sehingga publik menuntut keterbukaan lebih tinggi dari bank terkait dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Pemerintah Indonesia melalui OJK telah mendorong penerapan pelaporan keberlanjutan antara lain melalui POJK No. 51/POJK.03/2017. Regulasi yang ketat seperti ketentuan POJK terkait kewajiban

pelaporan keberlanjutan bagi lembaga keuangan turut mendorong bank untuk melakukan pengungkapan ESG secara sistematis. Namun, meskipun berada dalam sektor yang diatur secara seragam, praktik pelaporan keberlanjutan antar bank masih menunjukkan variasi yang cukup besar, baik dari segi cakupan informasi, kualitas, maupun kedalaman pengungkapan.

Sektor perbankan dipilih karena memiliki peran strategis yang tidak dimiliki oleh sektor lainnya. Perbankan berfungsi sebagai penggerak utama roda perekonomian melalui intermediasi keuangan. Bank tidak hanya bertanggungjawab terhadap keberlangsungan operasional internalnya, tetapi juga memiliki tanggungjawab eksternal yang besar dalam menentukan arah pembiayaan termasuk pembiayaan yang berdampak pada lingkungan dan sosial masyarakat. Disamping itu, bank memiliki banyak pemangku kepentingan dengan intensitas kepentingan yang tinggi seperti nasabah, investor, regulator dan publik yang menjadikan tekanan terhadap praktik keberlanjutan lebih kompleks dan signifikan dibandingkan sektor lain. Hal ini menciptakan peluang untuk mengamati variasi pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya berasal dari perbedaan kebijakan internal, melainkan juga dari dinamika eksternal dan ekspektasi stakeholder yang tinggi.

Penelitian ini memberikan gambaran sejauh mana perbankan telah merespons kebijakan tersebut secara empiris. Belum banyak studi empiris yang secara komprehensif menguji bagaimana tekanan dari pemangku kepentingan, kualitas tata kelola perusahaan dan struktur modal secara simultan memengaruhi pelaporan keberlanjutan, khususnya pada sektor keuangan seperti perbankan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan, dan struktur modal sebagai determinan pengungkapan pelaporan keberlanjutan, yang mana kombinasi variabel tersebut masih jarang dikaji secara simultan dalam konteks sektor perbankan di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas variabel-variabel tersebut secara parsial, tanpa mempertimbangkan interaksi dan pengaruh gabungan yang kompleks terhadap praktik keberlanjutan. Selain itu, riset sebelumnya juga belum banyak mengeksplorasi peran kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi yang dapat memengaruhi kekuatan hubungan antar variabel tersebut.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan teoritis yang holistik, melalui teori stakeholder dan legitimasi untuk memahami pengaruh tekanan eksternal, serta teori agensi dan institusional dalam menjelaskan peran mekanisme internal dan kekuatan institusional. Penempatan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi menjadi *novelty* utama karena memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana aktor institusional berkontribusi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab keterbatasan riset terdahulu, tetapi juga memperluas cakupan literatur dan memberikan implikasi praktis bagi penguatan tata kelola di sektor perbankan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Walaupun pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia meningkat dari 77 persen pada tahun 2021 menjadi 88 persen pada tahun 2022, namun dibandingkan negara lain khusus ASEAN, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih tergolong rendah.
- 2) Menurut data pelaporan iklim ASEAN tahun 2022 yang dikutip dalam UU (2022), tingkat pelaporan keberlanjutan masing-masing negara adalah sebagai berikut: Indonesia sebesar 44%, Malaysia sebesar 48%, Filipina sebesar 42%, Singapura sebesar 48%, dan Thailand sebesar 57%.
- 3) Perusahaan perbankan terlibat dalam pembiayaan proyek kepada perusahaan batubara, di antaranya PT Bank Mandiri Tbk sejumlah Rp 36 triliun. Termasuk beberapa bank Indonesia seperti PT BNI Tbk sejumlah Rp27 triliun, PT BRI Tbk dengan jumlah Rp 26 triliun, dan PT BCA Tbk sejumlah Rp12 triliun. Salah satu proyek yang didanai perbankan adalah PLTU Jawa 9 dan 10 yang pengoperasiannya diduga menyebabkan 4.700 kematian.
- 4) Kurangnya perhatian perusahaan di Indonesia terhadap masalah sosial dan lingkungan yang berfokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingannya.
- 5) Terdapat inkonsisten hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait pengaruh tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan, struktur modal terhadap pengungkapan laporan

keberlanjutan. Dengan demikian, perlu adanya studi empiris tambahan untuk memperkuat studi empiris sebelumnya untuk menciptakan hasil studi empiris yang konsisten dipandu oleh studi teoritis yang sudah ada.

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan guna membentuk generalisasi dengan tingkat kesalahan yang kecil. Adapun batasan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian sebatas menguji korelasi antar pengaruh tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan, struktur modal terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Dengan demikian unsur kebaruan penelitian ini yaitu penggunaan variabel moderasi kepemilikan institusional yang masih terbatas.
- 2) Penelitian ini hanya mengarah pada perusahaan sektor perbankan, sehingga temuan yang diperoleh memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi. Karakteristik sektor perbankan yang sangat diatur ketat oleh regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta kewajiban kepatuhan terhadap standar pelaporan dan prinsip kehati-hatian yang tinggi, membuat dinamika konservatisme akuntansi pada sektor ini berbeda dengan sektor-sektor lainnya. Selain itu, struktur pendanaan, sumber risiko, serta ekspektasi pemangku kepentingan di sektor perbankan cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan sektor non-keuangan. Oleh karena itu, hasil

penelitian ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menggambarkan praktik konservatisme akuntansi pada perusahaan di sektor lain, seperti sektor manufaktur, perdagangan, atau jasa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tekanan pemangku kepentingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?
- 2) Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?
- 3) Apakah struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?
- 4) Apakah kepemilikan institusional memperkuat pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?
- 5) Apakah kepemilikan institusional memperkuat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?
- 6) Apakah kepemilikan institusional memperkuat pengaruh struktur modal terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan tekanan pemangku kepentingan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh positif signifikan struktur modal terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dalam memperkuat hubungan tekanan pemangku kepentingan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dalam memperkuat hubungan tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan
- 6) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dalam memperkuat hubungan struktur modal terhadap praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas wawasan terkait pengungkapan pelaporan keberlanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang melakukan studi sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, seperti investor, calon investor, dan manajemen perusahaan, dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan pemahaman dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam praktik nyata. Pengungkapan pelaporan keberlanjutan juga memberikan gambaran mengenai upaya pembangunan berkelanjutan kepada para stakeholder, baik internal maupun eksternal.

